

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan merupakan hal yang penting untuk sebuah perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Kinerja keuangan yang buruk dapat berdampak negatif kepada perusahaan. Kekurangan dana untuk melakukan aktivitas perusahaan merupakan sesuatu yang mengganggu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan aset serta membayar liabilitas, dan dalam kasus yang ekstrem dapat membuat perusahaan bangkrut. Menurut Toto (2011:332), “kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu.” Kebangkrutan yang disebabkan kekurangan kinerja keuangan, seperti kasus PT. Sumalindo Jaya Lestari Tbk, yang bangkrut pada tahun 2011-2014 (Sari, Aplonia, Latief, 2017). Kebangkrutan yang buruk seperti itu, dapat membuat sebuah perusahaan menghentikan operasi dan mendisolusi aset, atau diserap entitas lebih besar, dengan risiko menghilang ciri khas aslinya. Selain perusahaan PT. Sumalindo, perusahaan milik negara juga dapat masuk kondisi kinerja keuangan yang buruk, yang dapat membangkrutkan perusahaan swasta. Hal ini tercermin dari analisa Andriani, Mai, dan Ruhadi (2021), tentang kondisi keuangan PT. Garuda Indonesia.

Untuk mencegah kebangkrutan dan konsekuensinya yang negatif, perlunya kinerja keuangan perusahaan bersifat kuat. Penelitian ini dibuat untuk memberi wawasan dalam fenomena kinerja keuangan di perusahaan publik, dengan dua variabel penting yang dapat memiliki dampak kepadanya. Variabel-variabel independen yang secara teoretis memiliki dampak kepada kinerja keuangan adalah Proporsi Komisaris Independen dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kedua variabel tersebut dapat dilihat dalam sisi manajemen dan akuntansi, karena ada

unsur-unsur implementasi operasional dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.

Konsep *Corporate Governance* dapat diartikan sebagai “Sekelompok peraturan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, pegawai, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam unsur hak dan kewajiban, atau sistem yang memimpin dan mengendalikan perusahaan.” (Cadbury, 1992). Supaya pengaturan tersebut efektif, perlunya dilakukan manajemen risiko. Risiko-risiko dalam *corporate governance* dapat datang dari banyak faktor-faktor, internal dan eksternal. Dalam sisi internal, risiko paling besar datang dari pihak manajemen, yang membuat keputusan. Walaupun pemilik perusahaan-baik yang punya peran sebagai direktur, komisaris, atau tidak-adalah pihak yang membuat agenda perusahaan, serta memberi pengarahan. Manajemen adalah pihak yang membuat keputusan sehari-hari, dan pihak yang mendorong perusahaan untuk berjalan. Tindakan manajemen dapat sesuai dengan visi, namun tindakan manajemen juga dapat berbeda dari kehendak para pemilik, menciptakan *gap* keputusan. Hal ini terungkap dalam teori agensi atau *agency theory* yang disusun oleh Ross (1973), dan dilebarkan oleh upaya Jensen dan Meckling (1976).

Secara sederhana-melalui pengartian Ross, Jensen, dan Meckling-dalam relasi yang ada hubungannya dengan kehendak atau kuasa yang memiliki dua pihak atau lebih; akan ada pihak yang mendelegasikan wewenang untuk bertindak dalam kepentingannya. Pihak yang memberi kuasa disebut *principal*, sedangkan pihak agen yang melaksanakan kehendak *principal*. Hal ini tercerminkan di dunia korporat, di mana operasi aktivitas perusahaan dilaksanakan oleh manajer, yang mendapatkan otoritas dari pihak pemilik. Karena manajemen banyak melakukan keputusan-keputusan sehari-hari tanpa input langsung pemilik, maka risiko *gap* keputusan besar, terutama jika ukur perusahaan besar.

Manajemen dapat melaksanakan keputusan yang tidak optimal karena tidak-kesengajaan atau dengan sengaja, dengan tujuan memajukan kepentingannya sendiri atau orang lain. Walaupun hal ini tidak dapat dihilangkan secara tuntas, atau sampai 100%; adapun cara untuk memastikan mutu pembuatan keputusan.

Pengendalian internal dalam perusahaan penting dalam memastikan operasi dan keputusan manajemen tepat. Auditor internal memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pengendalian internal, terutama dalam unsur-unsur operasional. Namun, auditor internal tidak dapat membuat keputusan langsung, hanya melaporkan penemuannya kepada, manajemen dan pembuat keputusan lainnya. (ICAEW, 2022)

Peran komisaris penting adalah pengawasannya, karena ia dapat memiliki otoritas yang lebih tinggi dari para pembuat keputusan perusahaan, yaitu direksi (Idris, 2021). Komisaris dapat mengawasi manajemen dan direksi, serta menegaskan keputusan. Dan jika diperlukan, komisaris dapat mengambil posisi direksi untuk membetulkan direksi yang kurang tepat. Komisaris berupa representatif para pemegang saham, yang disebut pemilik atau principal, yang tugasnya memastikan agen-agen lainnya bertindak seharusnya.

Komisaris independen dapat dimengerti sebagai komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, dan tidak memiliki saham (Bapepam No.Kep-29/PM/2204). Komisaris independen diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka mereka adalah organ yang memastikan kepentingan pemegang saham minoritas terpenuhi, dan supaya perusahaan tidak melakukan aksi dengan bias konfirmasi (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dan selain itu, komisaris independen dapat ditunjuk karena faktor kapasitasnya seperti, kepemilikan ilmu dan pengalaman dalam suatu bidang, memastikan bahwa perusahaan mendapatkan pengawasan spesialis di bidang-bidang yang diperlukan dan tepat. (Dwidinda, Khairunnisa, Triyanto, 2017). Karena itu, penelitian ini mengukur jumlah komisaris independen dari total komisaris untuk mengukur efek yang mereka miliki pada kinerja keuangan.

Variabel independen kedua yang diukur adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengertian CSR menurut Wahyudi (2008:36) adalah komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan

kepentingan pemangku kepentingan dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban perusahaan berasal dari teori *stakeholder* dan akibatnya atas legitimitas perusahaan.

Pemangku kepentingan atau *stakeholder*, adalah pihak yang kepentingannya harus diperhatikan dan dilayani oleh perusahaan. Hal ini tersirat di teori *stakeholder* yang pertama keluar dari memorandum internal SRI (Stanford Research Institute) di tahun 1963. Pengertian ini disimpulkan oleh Freeman (1984), “Kelompok-kelompok yang tanpa dukungannya, organisasi tidak akan ada.” Pemangku kepentingan tidak hanya meliputi pemegang saham, atau pembuat keputusan seperti manajemen. Namun, ada beberapa pihak eksternal yang menjadi pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemerintah, aktivis, organisasi-organisasi yang berhubungan dengan organisasi, dan lain-lain. Kepentingan setiap pemangku kepentingan harus di usahakan untuk dipenuhi oleh perusahaan. Walaupun dalam praktik, kadang ada kepentingan yang bertentangan yang susah dipenuhi.

Perusahaan yang tidak dapat memuaskan pemangku kepentingan atau melakukan tindakan yang tidak disenangkan oleh pemangku kepentingan dapat menyebabkan perusahaan untuk kehilangan legitimasi. Hal ini berasal dari teori *legitimacy*. Shocker dan Sethi (1973) menyatakan bahwa perusahaan membuat kontrak tersurat atau tersirat kepada masyarakat untuk mendasarkan pertahanan dan pertumbuhannya pada: 1) pelaksanaan sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat; dan 2) distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau politika kepada kelompok yang memberikan kuasa. Kehilangan legitimasi dapat menghasilkan dampak buruk pada perusahaan, seperti yang dicontohkan oleh Deegan (2002): “konsumen mungkin mengurangi permintaan produk-produk organisasi, pemasok mengurangi pasokan tenaga kerja dan modal kepada usaha, atau rakyat meminta pemerintah untuk menambahkan pajak, hutang, atau hukum-hukum yang melarang aksi yang tidak sesuai harapan komunitas.” Jika legitimasi perusahaan hilang, mendapatkannya kembali mungkin sulit, karena kehilangan kepercayaan yang sudah terjadi.

Untuk menjaga reputasi dan *prestige* sebuah perusahaan, atau memperbaikinya; perlunya ada implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah hal yang bersifat sukarelawan, dengan perusahaan dapat memilih mengimplementasi item-item yang ia sanggup, dan relevan pada situasi. Ada beberapa standar-standar CSR yang dapat diikuti oleh perusahaan seperti ISO 26000, POJK Nomor 51/POJK.03/2017, dan standar-standar GRI (*Global Reporting Initiative*). Selain implementasi, pengungkapan CSR juga bersifat sukarela. Maka, variabel ini terbatas oleh laporan perusahaan. Namun, pengukuran harusnya cukup andal, karena pengungkapan CSR biasanya menjadi kebanggaan perusahaan.

CSR dalam teori memiliki dampak kepada kinerja keuangan. Melaksanakan program-program CSR memerlukan dana, dan menambahkan biaya perusahaan. Maka, hal ini memiliki potensi mengurangi kinerja keuangan dan berdampak negatif pada laba perusahaan. Namun, dalam umumnya, CSR sering dibidang dapat menghasilkan untuk laba yang lebih baik, seperti dalam manfaat-manfaat CSR yang diuraikan dalam penelitian Wahyuningrum, Noor, dan Wachid (2014). CSR dapat meningkatkan profitabilitas karena efeknya atas reputasi dan/atau efisiensi sumber daya yang digunakan saat operasional, yaitu *Return on Assets*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak CSR pada kinerja keuangan; untuk dapat mencari tahu perspektif mana yang direfleksikan, apakah dampaknya positif, negatif, ataupun netral? Atau pun tak ada penemuan signifikan? Korelasi data yang relevan akan ditelusuri, dan pengungkapan serta pelaksanaan sukarela perusahaan-perusahaan BEI akan dibandingkan dengan performa perusahaan sebenarnya.

Sebelum penelitian ini, ada beberapa penelitian yang mengukur dampak *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada kinerja keuangan. Dan selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya mengukur Proporsi Komisaris Independen di dalam variabel independen *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam unsur GCG, penelitian-penelitian terdahulu yang ditautkan menunjukkan bahwa hasil menemukan GCG berdampak positif kepada kinerja keuangan. Penelitian-

penelitian Maharani dan Soewarno (2018), Itan (2020), Rahmawardani dan Muslichah (2020), Bunadi dan Tarjo (2022), serta Nurbayani, Norisanti, dan Samsudin (2021) menunjukkan hal ini. Sedangkan, dalam penelitian-penelitian tersebut, hasilnya yang berhubungan dengan CSR tidak selalu konsisten. Maharani dan Soewarno (2018), Itan (2020), serta Rahmawardani dan Muslichah (2020) menunjukkan CSR memiliki dampak positif kepada kinerja keuangan perusahaan. Namun penelitian Bunadi dan Tarjo (2022) serta Nurbayani, Norisanti, dan Samsudin (2021) menunjukkan bahwa tidak CSR tidak memiliki dampak yang signifikan hal pada kinerja keuangan.

Tidak konsistennya hasil CSR memberikan ruang untuk mencari hasil yang berarti bagi topik penelitian yang mirip. Penelitian Maharani dan Soewarno (2018), juga menggunakan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa GCG tidak dapat memiliki dampak pada kinerja keuangan perusahaan. Maka, penelitian ini memiliki peluang untuk menguji ulang variabel-variabel tersebut, dan untuk menunjukan penemuan mana yang lebih konsisten.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan penting dari penelitian terdahulu, yaitu tahun objek penelitian. Penelitian sebelumnya tahun yang tertua adalah 2018. Status dunia tetap berubah, maka diperlukan untuk menguji ulang penelitian untuk memeriksa hasil di dalam situasi baru. Karena itu, penelitian ini akan meneliti dampak Proporsi Komisaris Independen dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Kinerja Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021. Di tahun 2020, ada perubahan drastis yang dapat terasa dalam jangka-waktu yang cukup panjang setelah tahun tersebut, yaitu pandemi Covid-19. Maka, perubahan ini dapat menghasilkan dampak pada Proporsi Komisaris Independen serta implementasi dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian ini diharapkan untuk dapat mengungkapkan apakah ada perubahan di situasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perusahaan manufaktur dipilih menjadi objek penelitian karena perusahaan manufaktur umumnya menjadi subyek riset yang mirip. Perubahan operasional yang terjadi pada disrupsi yang terjadi di masa Covid-19 berpotensi untuk memiliki

efek pada variabel-variabel yang diteliti. Dan pertanyakan apakah ada korelasi kedua variabel independen kepada kinerja keuangan pada situasi uniknya dapat memberi gagasan baru yang berguna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Proporsi Komisaris Independen dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2019-2021.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberi manfaat dalam bentuk praktis:

1. Manfaat Akademis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambahkan wawasan peneliti.

- b. Hasil penelitian diharapkan untuk dapat digunakan untuk menjadi bahan perbandingan penelitian terdahulu dan untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi manajemen: supaya lebih sadar kinerja keuangan perusahaan mereka, dan bagaimana CSR dan Proporsi Komisaris Independen dapat berpotensi memberi dampak pada fenomena tersebut.
- b. Bagi pemangku kepentingan: diharapkan untuk dapat lebih mengerti dampak yang mereka miliki pada kondisi keuangan perusahaan melalui pengawasan mereka pada CSR dan efektivitas kinerja para Komisaris Independen, serta memberi akuntabilitas pada kesalahan yang dilakukan perusahaan.
- c. Bagi komisaris: diharapkan untuk dampak yang mereka miliki pada kondisi keuangan perusahaan melalui pengawasan mereka terutama para Komisaris Independen dan ketaatan CSR dari hasil pengawasan mereka.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori –teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk menjawab perumusan masalah dan menciptakan metode penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, dan analisis data yang telah dikumpulkan.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini tentang penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan mengenai hasil pengujian.

BAB 5 : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, berbagai keterbatasan yang ditemui saat melakukan penelitian dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.